

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan pada dunia perdagangan terus mengalami perubahan seiring dengan terjadinya globalisasi. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menjadi alasan perusahaan dalam mengelola usahanya agar lebih kreatif dan berkualitas. Perusahaan atau entitas yang tidak mampu untuk bersaing dan bertahan pada perkembangan ini kemungkinan besar akan hilang dari dunia bisnis. Setiap entitas atau perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan menyajikan informasi bagi *stakeholder* maupun *shareholder*, selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Sehingga perusahaan diwajibkan untuk mampu mengatur dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien agar informasi atau data yang disampaikan pada laporan keuangan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laba atau keuntungan perusahaan menjadi salah satu indikator penting bagi pengguna laporan keuangan untuk menjadi cerminan dari kinerja perusahaan. Harga saham akan berbanding lurus dengan laba atau keuntungan perusahaan. Maka, perusahaan atau entitas yang memiliki prospek laba yang rendah akan menghasilkan harga saham lebih rendah dari perusahaan yang memiliki prospek keuntungan yang lebih tinggi. Laba atau keuntungan setiap perusahaan mempunyai pengaruh dalam pemasukkan negara melalui pembayaran pajak. Laba atau keuntungan digunakan sebagai dasar penghitungan kewajiban dari perpajakan.

Kewajiban membayar pajak berbanding lurus dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan, jika perusahaan memperoleh penghasilan tinggi maka beban pajak yang akan dibayarkan akan semakin besar. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya memotivasi para manajer untuk melakukan upaya-upaya dalam mengelola laba secara oportunistik atau memanipulasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan manajemen laba. Manajemen laba ialah metode, prinsip, dan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh pihak manajemen perusahaan dengan maksud untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam melaporkan laporan keuangan, Scott (2015) dalam (Husain, 2017).

Beberapa kasus yang terjadi terkait manajemen laba pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Contoh pertama kasus praktik manajemen laba menimpa perusahaan raksasa bidang farmasi yaitu PT Kimia Farma Tbk. Perusahaan yang tercatat dengan kode KAEF pada Bursa Efek Indonesia ini terdapat bukti yang ditemukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) pada tahun 2002 yaitu kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dengan pencatatan nilai persediaan barang jadi dan kekeliruan pencatatan pada nilai penjualan. Laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk menghasilkan *overstated* laba sebesar 32,6 miliar rupiah atas kesalahan yang disebabkan pada penyajian laporan keuangan untuk 31 Desember 2001 dalam Rachman (2020). Hal serupa terjadi pada perusahaan yang juga bergerak dibidang farmasi yaitu PT Indofarma Tbk. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam tahun 2014 menghasilkan penemuan penyajian laporan keuangan yang dianggap lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya disajikan. Bapepam menemukan nilai harga pokok penjualan PT

Indofarma Tbk seharusnya berjumlah 28,8 miliar rupiah, namun yang terjadi pada tahun 2001 laporan keuangan PT Indofarma Tbk menyajikan persediaan dengan nilai 28,87 miliar rupiah. Sehingga terdapat *overstated* pada nilai persediaan yang dilaporkan PT Indofarma tahun 2001 (sumber: www.finance.detik.com diakses pada 25 September 2021).

Kasus yang sama juga dialami perusahaan bidang manufaktur dengan kode AISA yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Perusahaan tersebut melakukan penggelembungan nilai piutang dengan enam perusahaan yang melakukan kerjasama pada laporan keuangan yang dilaporkan pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan Jogo Mogoginta yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur AISA, dimana pada saat itu ia memerintahkan untuk menaikkan nilai piutang sebesar Rp 3 triliun dengan tujuan untuk menarik perhatian kreditur dan investor agar mau memberikan pinjaman dan berinvestasi kepada perusahaan. Pelanggaran dibuktikan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan analisa terhadap AISA yang mencatat enam perusahaan tersebut dicatat sebagai pihak ketiga namun kenyataannya enam perusahaan itu merupakan pihak yang terafiliasi dengan AISA.

Pada September 2019 ditemukan kembali kejanggalan pada laporan keuangan AISA dengan laba bersih menembus angka Rp 1,3 triliun sementara laporan keuangan yang dilaporkan pada Desember 2018 AISA mengalami kerugian sejumlah Rp 123,43 miliar. Ketika ditelusuri penghasilan lainnya sejumlah Rp 1,9 triliun dari nilai penghasilan lainnya yang dilaporkan hanya Rp 18,11 miliar sehingga berdampak pada laba usaha perusahaan yang meningkat pesat menjadi Rp 1,49 triliun dari rugi usaha Rp 9,25 miliar (sumber: www.cnbcindonesia.com)

diakses pada 25 September 2021). Berdasarkan kasus tersebut tindakan menaikkan akun-akun laporan keuangan yang berkaitan dengan laba agar laporan keuangan terlihat baik untuk menarik kreditur maupun investor, bagian ini merupakan salah satu motivasi perusahaan untuk melangsungkan praktik dari manajemen laba yaitu *income maximization* yakni dengan menyajikan laba periode dengan jumlah yang lebih besar dari keadaan sesungguhnya. Keadaan ini merujuk kaitannya dengan teori agensi yang beranggapan bahwa diantara prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang berbeda, dalam hal ini hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan.

Praktik manajemen laba yang timbul adalah bagian konsekuensi yang berasal dari perkara keagenan (*agent theory*) yaitu hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Perbedaan kepentingan ini juga terjadi pada perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan sebagai (*principal*) dan pemerintah sebagai (*agent*), dalam hal ini dilihat dari sisi perpajakan. Dasar penghitungan atas laba perusahaan merupakan beban pajak yang tentunya harus dibayarkan untuk kontribusi kepada pemerintah yang nantinya diperuntukkan dalam membiayai kebutuhan negara dan mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki harapan pada penerimaan pajak yang merupakan sumber penghasilan utama. Pajak merupakan elemen penting bagi penerimaan negara, lebih dari 80% pendanaan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak. (sumber: kemenkeu.go.id diakses pada 25 September 2021).

Penerimaan pajak yang paling besar di Indonesia bersumber dari pajak penghasilan. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang utama, mendorong pemerintah untuk selalu berusaha menjaga kestabilan dan melakukan penerimaan pajak dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan untuk dapat mencapai sejumlah nilai penerimaan negara dari pajak yang telah ditentukan. Pajak penghasilan badan yang selanjutnya disebut PPh Badan menjadi salah satu penghasil penerimaan negara yang terbesar. Mulai dari tahun 2009 tarif PPh Badan menetapkan sistem tarif tunggal yang disebut dengan *single tax* sebesar 28% dan kemudian direvisi lalu ditetapkan menjadi 25% di tahun 2010 dan berjalan hingga saat ini. Selain itu, untuk perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif menjadi 20% dari tarif awal yaitu 25%. Pendapatan perusahaan yang dihitung dari penghasilan neto (laba) fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal maka angka tersebutlah yang akan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. (sumber: www.pajak.go.id diakses pada 25 September 2021)

Oleh karena itu, penyampaian informasi dari laba atau keuntungan perusahaan yang nantinya akan memengaruhi pembebanan perpajakan menjadi indikator penting pada laporan keuangan dan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk kontribusi kepada negara. Pemerintah sebagai instansi yang berkewajiban memungut pajak berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Sebaliknya, pembayaran pajak dengan jumlah seminimal mungkin merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan. Perencanaan pajak menjadi salah satu faktor pendorong manajer dalam melangsungkan praktik manajemen laba untuk meraih tujuannya di dalam perusahaan.

Proses dilangsungkan dengan memanfaatkan laba yang direkayasa oleh pihak manajemen perusahaan dengan tujuan meminimalkan atau memaksimalkan laba. Perusahaan menerapkan praktik manajemen laba selain untuk menyajikan laporan keuangan dengan keuntungan yang maksimal kepada para pemilik saham, manajemen atau manajer juga ingin menyajikan laba seminimum mungkin untuk keperluan perpajakan.

Pada umumnya manajemen laba merupakan keputusan perusahaan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan akuntansi yang diambil perusahaan untuk menurunkan laba fiskal yakni dengan melangsungkan perencanaan pajak (*tax planning*). Manajemen pajak digunakan untuk memperkirakan besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga menghasilkan nilai seminimal mungkin. Motif dari perencanaan pajak yakni melaksanakan penghematan pembayaran biaya pajak namun tetap sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Astutik & Mildawati, 2016). Efektifitas penggunaan kredit pajak akan mendukung proses keberlangsungan dari perencanaan pajak.

Perbedaan diantara laba komersil (perhitungan metode akuntansi) dan fiskal (perhitungan peraturan perpajakan) menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan. Hal tersebut mampu memengaruhi perusahaan dalam melangsungkan praktik manajemen laba dikarenakan beban pajak dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan. Akun beban pajak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengakui pendapatan lebih awal dan menunda pengakuan beban-beban tertentu tanpa melampaui batas standar peraturan akuntansi yang berlaku. Dalam melangsungkan praktik manajemen laba perusahaan dihadapkan pada situasi yang

berlawanan. Hal ini menjadi dilema bagi manajer, dimana umumnya keadaan tersebut dilakukan untuk menyajikan kinerja laporan keuangan yang baik dengan menunjukkan laba yang maksimal. Namun disisi lain, manajemen perusahaan juga ingin melakukan penghematan terhadap pembayaran pajak. Memanipulasi laba menjadi lebih tinggi dalam penyajian laporan keuangan menjadi dan membuat laporan pajak secara terpisah menjadi solusi untuk meraih tujuan dari keduanya.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji antara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dengan manajemen laba. Penelitian yang dihasilkan oleh Prasetyo, Riana, dan Masitoh (2019), Erawati dan Lestari (2019), dan Wulansari (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak mampu memengaruhi manajemen laba ke arah positif. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, Wardani dan Santi (2018) dan Andrayani, Fitriasuri, dan Terzaghi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perencanaan pajak tidak mampu untuk memengaruhi manajemen laba. Lestari (2018) dan Wulansari (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa beban pajak mampu memengaruhi manajemen laba ke arah positif. Sebaliknya, pada penelitian Prasetyo, Riana, dan Masitoh (2019) manajemen laba tidak dapat terpengaruh oleh beban pajak tangguhan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan kualitas audit sebagai variabel moderasi yang dianggap mampu memoderasi diantara hubungan variabel independen dengan dependennya. Melangsungkan audit dengan pihak eksternal diharapkan mampu mengurangi atau mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang merupakan maksud dari kualitas audit. Dengan adanya langkah dari perusahaan dalam mengelola atau mengorganisir laba, maka

perusahaan memerlukan pihak yang berdiri secara independen diluar dari perusahaan dalam memitigasi kemungkinan terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan dapat merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya dan mampu dipercaya. Auditor dibutuhkan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan, laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor yang berkualitas (*big four*) diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih bermutu dibandingkan dengan auditor yang tidak berkualitas (*non-big four*). Dalam kaitannya dengan praktik manajemen semakin berkualitas auditor maka kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat dicegah dan ditemukan terlebih dahulu bila memang kemungkinan itu ada sebelum menyajikan laporan keuangan kepada *public*. Kualitas audit diukur dengan menggunakan proksi dari reputasi ukuran KAP, hal ini dianggap bahwa reputasi KAP akan memengaruhi hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Penelitian yang telah dilakukan Erawati & Lestari (2019) dan Prasetyo, Riana, & Masitoh (2019) menyebutkan bahwa kualitas laporan yang telah dilakukan audit oleh auditor dari KAP *big four* terbukti dapat memitigasi adanya praktik manajemen laba. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif untuk memperkuat hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dengan manajemen laba. Sehingga perusahaan yang melangsungkan praktik manajemen laba dengan cara melakukan manajemen pajak atau perencanaan pajak dan memanfaatkan adanya beban pajak tangguhan pada perusahaan dapat dicegah dengan adanya kualitas audit yang baik dari auditor kantor akuntan publik *big four*.

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Negara & Suputra (2017). Penelitian ini menambahkan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Perbedaan lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pengamatan selama periode 2018-2020 untuk seluruh sektor industri. Penulis menggunakan sektor tersebut agar mendapat gambaran keseluruhan perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan manajemen laba. Kualitas audit yang dihasilkan dari berbagai kantor akuntan publik menjadi faktor penulis menduga adanya hubungan dengan pengaruh praktik manajemen laba di dalam perusahaan.

Berlatar belakang dari penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait manajemen laba dengan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian yang telah tercantum dalam Bursa Efek Indonesia. Alasan penulis pemilihan sektor industri tersebut karena dianggap memiliki berbagai jenis usaha dan perkembangan yang pesat serta memiliki ruang lingkup yang besar. Sehingga penulis akan menguji dan memperoleh pemahaman yang dalam mengenai **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tanggahan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah perencanaan pajak yang diukur dengan *tax retention rate* berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 2) Apakah beban pajak tangguhan yang diukur dengan *deffered tax expense* berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 3) Apakah kualitas audit yang diukur dengan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 4) Apakah kualitas audit yang diukur dengan reputasi kantor akuntan publik mampu memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba?
- 5) Apakah kualitas audit yang diukur dengan reputasi kantor akuntan publik mampu memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh tujuan diantaranya :

- 1) Membuktikan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang diukur dengan *tax retention rate*.
- 2) Membuktikan pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang diukur dengan *deffered tax expense*.
- 3) Membuktikan pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba yang diukur dengan reputasi ukuran KAP.

- 4) Membuktikan pengaruh moderasi kualitas audit terhadap hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba.
- 5) Membuktikan pengaruh moderasi kualitas audit terhadap hubungan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teori maupun praktik, diantaranya :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan serta dapat menjadi bahan referensi kajian yang bersangkutan dengan strategi manajemen laba perusahaan.
 - b. Akademisi, sebagai bahan referensi tambahan dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya serta sebagai pembanding untuk memperluas wawasan tentang manajemen laba.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Perusahaan, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi karyawan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan manajemen laba yang sesuai dengan standar dan peraturan akuntansi yang berlaku.
 - b. Pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau solusi untuk penentuan penetapan pajak sehingga perusahaan dapat mematuhi peraturan yang ada.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan tidak adanya permasalahan yang dibahas diluar masalah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

- 1) Penulis hanya akan meneliti perusahaan industri manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.
- 2) Periode penelitian dengan rentang waktu tiga tahun dari 2018 sampai 2020.
- 3) Manajemen laba sebagai variabel dependen menjadi fokus utama untuk memengaruhi perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yang berperan sebagai variabel independen pada penelitian ini, dengan menambahkan kualitas audit sebagai pemoderasi.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020” ini akan menjelaskan secara singkat isi serta penjelasan dari setiap bab. Sistematika pembahasan akan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab awalan ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis memilih judul penelitian “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi” dengan studi kasus yang terjadi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi uraian mengenai definisi, konsep dasar, tinjauan literatur yang diteliti sehubungan dengan variabel yang telah diteliti terdahulu digunakan sebagai acuan, kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi uraian mengenai rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada masing-masing variabel, bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga metode analisis data sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran sampel, statistik deskriptif, serta hasil dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis untuk penelitian selanjutnya serta saran yang perlu disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan.

